

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketidakmerataan dalam pembangunan nasional sesungguhnya tidak terlepas dari kemiskinan. Bila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerataan input merupakan usaha untuk mendistribusikan kesempatan-kesempatan dalam segala sektor kehidupan masyarakat dengan seadil-adilnya dengan mengusahakan program-program penunjang sebagai suatu proses awal kemudian berlanjut pada pemerataan proses, yang mulai membedakan faktor status sosial, suku, pendidikan, agama, dan kondisi ekonomi. Sedangkan pemerataan output melihat bagaimana keberhasilan seseorang dalam mengakomodasikan kesempatan-kesempatan pemerataan yang telah diberikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang tidak ingin dialami oleh setiap individu. Disadari bahwa peluang memperoleh kesejahteraan adalah hak semua orang sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bahwa menciptakan kesejahteraan adalah tujuan utama pembangunan.

Ketidak layak hunian merupakan penjelmaan dari dampak yang diakibatkan dari faktor kemiskinan. Disamping hal tersebut diatas ketidak layak hunian juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dan pendapatan rendah. Dari data yang dilakukan oleh “Susenas” 2000 memperlihatkan bahwa dari sekitar 49 juta rumah tangga di Indonesia 9,9 persen rumah tangga menempati rumah yang tidak layak huni dan 16,5 persen “agak” layak huni (rawan tidak layak huni).

Pada intinya kemiskinanlah yang menjadi penyebab yang sangat mendasar disamping penyebab lain. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa dari 25,53 persen rumah tangga yang tinggal dirumah tidak layak huni memiliki pengeluaran 20 persen dibawah garis kemiskinan dan 20,79 persen lagi memiliki pengeluaran 10 persen dibawah garis kemiskinan (BPS Depkesos 2001).

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang akan sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya, namun apabila hal tersebut malah sebaliknya maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa desa Madukoro merupakan desa yang cukup maju, ditandai dengan sudah ada perusahaan industri yang

berdiri yaitu PT Medco Ethanol Lampung, kemudian masyarakat desa Madukoro sebanyak 25% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, 25% bekerja sebagai wirausaha, dan 50% sisanya bermatapencarian sebagai sopir, buruh tani, montir, pedagang dan sebagainya. Meski terbilang cukup maju, kemiskinan tidak dapat dipisahkan.

Aparatur desa tidak serta-merta membiarkan kemiskinan semakin menyebar, berbagai program dan bantuan untuk mengentaskan telah diupayakan yaitu salah satunya program Kelompok Tani yang mengupayakan agar masyarakat dapat bercocok tanam jagung, kacang-kacangan, dan padi sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian program pemerintah yang pernah terealisasi yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah terselenggara pada tahun 2007-2008 dan kemudian yang saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan pada tahun 2011 kemarin.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya berupa pembangunan baru dan peningkatan kualitas, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) perumahan swadaya masing-masing sebanyak 50.000 unit.

Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

Kegiatan BSPS tahun 2011 masih mengacu pada Permenpera No:08/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank. Pelaksanaan BSPS tahun ini sebanyak 25.000 unit, dengan rincian kegiatan Pembangunan Baru (PB) sebanyak 12.500 unit dan kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 12.500 unit. Sementara itu, bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebanyak 12.500 unit untuk kegiatan PK. Program ini dilaksanakan pada 32 Provinsi dan 209 kabupaten/kota. Program ini dilakukan secara terus-menerus oleh Pusat Pengembangan Perumahan (P2P) dan Kementerian Perumahan Rakyat guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni.

Menurut hasil observasi yang diamati di lapangan, penyimpangan prosedur pendataan yang dilakukan oleh panitia yaitu kesalahan dalam mendata kepala keluarga yang berhak menerima, yang seharusnya tidak berhak mendapat akan tetapi didata sebagai penerima bantuan. Selain itu, praktik kolusi terjadi pada proses pendataan. Kemudian dari 10 dusun yang ada di desa Madukoro, yang didata hanya 6 dusun. Para aparat desa pun tidak diikutsertakan dalam proses pendataan seperti halnya dari aparat yang terendah seperti Rukun Tetangga (RT)

tidak mengetahui mengenai bagaimana prosedur serta proses penyaluran dana BSPS, sehingga pada saat ketua RT ditanyai oleh warga beliau tidak bisa menjawab. Dan Kades pun, diberitahu pada saat dana akan dicairkan.

Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dilakukan pada bulan November 2011 yang sebelumnya dilakukan pendataan kepada Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima dengan syarat yang telah ditentukan pada bulan Agustus 2011 yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Utara.

Pada tahun 2011 jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1265 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Jumlah kepala keluarga (KK) Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011

No.	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)
1.	Gelok	320 KK
2.	Banjar Harum I	125 KK
3.	Banjar Harum II	120 KK
4.	Tanjung Anom	142 KK
5.	Manggris	140 KK
6.	Pringgondani II	125 KK
7.	Pringgondani I	103 KK
8.	Karang Kedempel	80 KK
9.	Karang Sumaritim	45 KK
10.	Barujaya	65 KK
	<b>Jumlah</b>	<b>1265 KK</b>

Sumber: Data Primer dari Balai Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2011.

Menurut jumlah data kepala keluarga tersebut, yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebanyak 41 kepala keluarga dengan kegiatan pembangunan baru sebanyak 37 KK dan 4 kepala keluarga dengan kegiatan peningkatan kualitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2** Daftar nama Kepala Keluarga (KK) yang menerima BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011

<b>No</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah KK</b>
1.	Pembangunan Baru (PB)	37 KK
2.	Peningkatan Kualitas (PK)	4 KK
<b>Jumlah</b>		<b>41 KK</b>

Sumber: Lembaga Keuangan Mikro Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011.

Sebagian besar kepala keluarga (KK) yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani. Salah seorang kepala keluarga (KK) yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berpendapat bahwa “pemberian dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam membangun rumah mereka, mereka harus menambah biaya dalam menyelesaikan pembangunan karena bahan material saat ini naik, dan belum lagi mereka harus membayar tukang. Selain itu banyak warga yang kecewa karena tidak terdata dalam daftar penerima.

Pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, pemerintah memberikan bantuan pada masing-masing daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran kompensasi atau sekitar Rp. 390.000.000,- dengan rincian Rp. 370.000.000,- untuk pembangunan baru (PB) sebanyak 37 unit dan Rp. 20.000.000,- untuk pembangunan peningkatan kualitas (PK) sebanyak 4 unit, untuk Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2011.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
2. Sistem pendataan kepala keluarga (KK) yang berhak menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
3. Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan penyaluran dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi pada “Persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka perumusan masalah di atas adalah “Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara”.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pembatasan masalah dan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.



## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku, sikap, moral, dan etika yang terkait dengan konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan yang berkaitan dengan masalah-masalah masyarakat.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini secara praktis berguna untuk:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat guna meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang berhak menerima.
2. Sebagai tolak ukur untuk menambah wawasan ilmu tentang program pemerintah terutama yang berkaitan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

3. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan suplemen materi pokok tentang sikap positif dalam masyarakat politik pada mata pelajaran Kewarganegaraan di kelas 1 SMA.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan karena berkaitan dengan sikap, nilai, dan moral masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimana setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

### **2. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

### **3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

### **4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

### **5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah penelitian dilakukan setelah terbitnya surat izin penelitian dari FKIP dan selama berlakunya surat izin penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teoretis**

#### **1. Pengertian Persepsi**

Adapun pengertian persepsi secara umum adalah pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1983: 39) “Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek”. Dari pendapat tersebut persepsi dapat diartikan sebagai kesan-kesan dan penafsiran seseorang terhadap objek tertentu. Sedangkan dilihat dari keseluruhan, persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, yang di dalam prosesnya dilalui dengan adanya pandangan yang berasal dari komponen pengetahuan sehingga akan mempunyai gambaran yang dapat dinyatakan dalam perilaku terhadap objek tertentu.

Menurut Harold J. Leavitt dalam Muslichah Zarkasi (1992: 107) menyatakan bahwa “Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau

pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu”. Sedangkan menurut Irwanto (1996: 71) menyatakan persepsi adalah “Proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai disadari dan dimengerti”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap lingkungan berdasarkan pada pengamatan, pengetahuan, dan pengalaman. Persepsi berada pada pikiran dan perasaan manusia secara individu sehingga memungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda walaupun objek yang dikaji sama.

### **1) Syarat-syarat Mengadakan Persepsi**

Seseorang agar dapat mengadakan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
- b. Alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat guna untuk menerima stimulus disamping harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- c. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis, dan psikologis. (Bimo Walgito, 1993: 54)

Menurut pendapat di atas untuk mengadakan suatu persepsi maka dibutuhkan adanya objek yang sedang terjadi, adanya penginderaan dan diperlukan suatu perhatian.

Selain itu, Bimo Walgito menyatakan proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kealaman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terkaji dalam otak ini merupakan proses psikologis. (Bimo Walgito, 1993: 76)

Dari beberapa pendapat para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah adanya suatu objek tertentu kemudian disalurkan oleh alat indera ke otak dan kemudian otak mengolahnya menjadi suatu persepsi dari apa yang diterima oleh alat inderanya. Selain itu suatu objek dapat pula dipersepsikan secara berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, karena beberapa sebab diantaranya adalah karena memiliki pola berpikir yang berbeda.

Menurut Irwanto (1996: 96-97) “persepsi sangat bersifat psikologis dari pada proses penginderaan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsangan serta nilai-nilai dan kebutuhan individu dan pengalaman terdahulu”.

## 2) Hal-hal yang Mempengaruhi Persepsi

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1983: 14-15) hal-hal yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian  
Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Set  
Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.
3. Kebutuhan  
Kebutuhan sesaat maupun pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
4. Sistem nilai  
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pada persepsi seseorang.
5. Ciri Kepribadian  
Misalnya A dan B bekerja di suatu kantor. A seseorang yang penakut akan mempersepsikan alasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B seseorang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.
6. Gangguan Kejiwaan  
Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya hal-hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, persepsi seseorang sangat menentukan perilaku baik persepsi negatif terhadap suatu objek yang dapat mengakibatkan motivasi yang salah atau kurang tepat bagi seseorang, sebaliknya persepsi yang positif terhadap suatu objek dapat mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang.

### 3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Secara garis besar telah diberikan penjelasan mengenai pengertian persepsi, syarat-syarat melakukan persepsi, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi persepsi, maka perlu kiranya diberikan sedikit penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, maka akan timbul berbagai persepsi antara satu orang dengan orang yang lainnya terhadap objek yang sama.

David Krech dan Crutchfield sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (1994: 55-59) menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

#### 1. Faktor Fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau stimulant tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulant itu. Faktor-faktor fungsional ini terdiri atas:

- a. Kebutuhan-kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan persepsi.
- b. Kesiapan mental, suasana mental seseorang akan mempengaruhi perbedaan persepsi seseorang.
- c. Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik dia dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan berpengaruh pada persepsi.
- d. Latar belakang budaya, latar belakang budaya dimana orang tersebut berada atau berasal, berpengaruh terhadap objek rangsangan.

#### 2. Faktor Struktural

3. Factor structural semata-mata berasal dari sifat stimulant fisik dan dalam system syaraf individu yang meliputi:

- a. Kemampuan berpikir
- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia.

(Rakhmat, 1994: 55-59)



Persepsi seseorang itu dapat berubah-ubah, misalnya dari baik menjadi buruk dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor Konsepsi
3. Factor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang diri sendiri. Faktor yang berhubungan dengan tujuan dan dorongan untuk menghasilkan rangsangan. (Ensiklopedi Umum, 1977: 886)

Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, umumnya persepsi seseorang dipengaruhi oleh cara belajar, latar belakang budaya, pendidikan, pola pikir, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yangbermacam-macam seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau paham, kurang paham, tidak paham terhadap objek yang diteliti.

## **2. Pengertian Persepsi Masyarakat**

Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa ahli adalah menurut Ralp Linton dalam Soerjono Soekanto (2001: 91) mengatakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu ketentuan sosial dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan dengan jelas.

Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (2001: 92), menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Sedangkan Koentjaraningrat (1990: 146) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat dalam suatu rasa identitas bersama”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu lingkungan terhadap suatu objek berdasarkan pada pengamatan, pengetahuan dan pengalaman sehingga memungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki pandangan yang berbeda walaupun objeknya sama.

### **3. Pengertian Sikap**

Pada umumnya bila seseorang dihadapkan pada pertanyaan tentang sikap, maka orang akan menjawabnya dengan opini, keyakinan, perasaan, perilaku atau kesungguhan perilaku yang dapat dilihat dalam kehidupan nyata. Agar pengertian sikap menjadi jelas, maka ada beberapa pendapat para ahli yang dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Menurut Sarlito Sarwono (1984: 20) sikap adalah “kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu di mana sikap ini biasa terjadi terhadap benda, situasi,

orang, kelompok, nilai-nilai dan semua hal yang terdapat di sekitar manusia”.

Menurut Thrustone dalam buku Eddy Soewadi Kartawijaya (1996: 23) “sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek psikologi”. sedangkan menurut Doob dalam Sarlito Wirawan Sarwono (1999: 23) “sikap adalah tingkah laku balas yang tersembunyi (*implicate response*) yang terjadi langsung setelah ada rangsangan baik secara disadari maupun tidak disadari”.

Menurut Bimo Walgito (1993: 53-54) “sikap itu adalah sesuatu yang tidak dibawa sejak lahir yang berarti individu atau setiap manusia pada baru lahir belum membawa suatu sikap tertentu, maka sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu”.

#### **a) Ciri-ciri Sikap**

Sikap adalah suatu gejala psikologis yang tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung tetapi keberadaan sikap harus ditarik kesimpulan dari hasil-hasilnya. Sikap merupakan faktor yang ada pada setiap diri manusia yang mendorong dan dapat menimbulkan perubahan dalam perilaku. Untuk membedakan sikap dengan pendorong lainnya maka akan dikemukakan ciri-ciri sikap.

Menurut Bimo Walgito (1993: 53-54) ciri-ciri sikap adalah:

1. Selalu ada hubungan antara individu dengan proses pengenalan atau persepsi terhadap objek tertentu.
2. Sikap dapat tertuju pada suatu objek tetapi dapat pula tertuju pada sekumpulan objek.

3. Sikap dapat berlangsung lama dan sebentar.
4. Sikap dapat mengandung faktor perasaan tertentu, apakah perasaan itu bersifat positif atau bersifat negatif terhadap suatu objek.

Berdasarkan pendapat tersebut maka akan terlihat bahwa subjek sangat berkaitan dengan objek, dimana sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir tetapi terbentuk melalui proses pembelajaran dari individu itu sendiri.

#### **b) Komponen Sikap**

Mengenai komponen sikap, ada tiga macam komponen yaitu kognisi, afeksi dan konasi, ketiga ranah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Komponen kognisi berhubungan dengan keyakinan (*beliefs*), ide dan konsep;
2. Komponen afeksi yang menyangkut emosional seseorang;
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Komponen kognisi berhubungan dengan keyakinan/kepercayaan seseorang mengenai objek sikap. Kepercayaan terhadap sesuatu sebagai objek sikap akan mempolapikirkan seseorang, artinya objek sikap dalam hal ini sangat berperan sekali terhadap tugas yang diembannya. Komponen afeksi yang menyangkut emosional banyak ditentukan oleh kepercayaan. Bila seseorang telah memandang negatif terhadap orang lain, maka akan merasa malas dan hasilnya pun sangat tidak sesuai dengan yang harapan. Komponen konasi dalam sikap menunjukkan

kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan sikapnya terhadap orang lain. Bila seseorang merasa tidak suka terhadap orang lain, maka wajar bila orang tersebut enggan menyapa dan berkomunikasi dengan orang tersebut.

Antara komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang selaras, saling berhubungan dan berpadu satu sama lainnya menyebabkan dinamika yang cukup kompleks dan dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku individu.

### c) Fungsi Sikap

Katz (dalam Azwar, 1995) menyebutkan fungsi sikap ada empat, yaitu:

1. Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat yang menunjukkan bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkannya. Dengan demikian, maka individu akan membentuk sikap positif terhadap hal-hal yang dirasakan akan mendatangkan keuntungan dan membentuk sikap negatif terhadap hal-hal yang merugikannya.
2. Fungsi pertahanan ego yang menunjukkan keinginan individu untuk menghindarkan diri serta melindungi dari hal-hal yang mengancam egonya atau apabila ia mengetahui fakta yang tidak menyenangkan, maka sikap dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut.
3. Fungsi pernyataan nilai, menunjukkan keinginan individu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang dianutnya sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya.
4. Fungsi pengetahuan menunjukkan keinginan individu untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran dan untuk mengorganisasikan pengalamannya.

#### **4. Pengertian Sikap Masyarakat**

Menurut Selo Soemarjan dalam Soerjono Soekanto (2001: 92), menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Sedangkan Koentjaraningrat (1990: 146) mengemukakan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat dalam suatu rasa identitas bersama”.

Menurut Ralp Linton dalam Soerjono Soekanto (2001: 91) mengatakan bahwa “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu ketentuan sosial dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat adalah kecenderungan seseorang dalam masyarakat untuk bertingkah laku terhadap suatu objek yang akan menimbulkan perasaan menyukai atau menolak suatu objek dan sikap terbentuk dalam perkembangan individu bukan bawaan dari lahir. Dengan demikian sikap sangat menentukan cara hidup seseorang dalam bermasyarakat.

#### **5. Kebutuhan Manusia**

Manusia berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Termasuk dalam kebutuhan primer antara lain kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan. Mengapa kebutuhan seperti itu dinamakan primer?. Ditinjau dari sudut pandang etimologi (asal usul kata), kebutuhan primer itu berarti kebutuhan yang pertama kali dibutuhkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Primer sendiri berasal dari kata *primus* yang berarti “pertama”. Agar tetap hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian layak serta harus pula mempunyai tempat tinggal untuk berlindung dari hujan, matahari, dan udara dingin. Akan sulit bagi manusia untuk melaksanakan jati dirinya sebelum kebutuhan primernya terpenuhi. Itulah mengapa kebutuhan primer disebut “kebutuhan alamiah”. Selanjutnya kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan setelah kebutuhan terpenuhi atau dengan kata lain kebutuhan sekunder dan tersier merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Selain rumah menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi, rumah juga termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Seperti dikemukakan oleh Kluckhohn, dalam buku Soekanto (2001: 71) menurutnya terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat dianggap sebagai *cultural universal*, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).

3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).

Berdasarkan penjelasan mengenai penjelasan kebudayaan, bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimanaseharusnya manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.

#### **6. Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah terhadap masyarakat. Sedangkan stimulan diharapkan dapat menjadi starter pada masyarakat agar dapat memicu semangat dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penyaluran berarti suatu proses, penyampaian, pembuatan, cara menyalurkan dan mengalirkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990: 773). Sedangkan menurut Sudijono (2000 :35) penyaluran adalah “proses pendistribusian, pembagian atau pencairan”. Bantuan stimulan adalah fasilitasi pemerintah



berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. (Permenpera No. 14 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1-2)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya adalah proses pemberian dana dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB) pada masing-masing daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kegiatannya meliputi:

1. Kegiatan pembangunan baru yaitu pemberian dana tunai sebesar Rp. 10.000.000,- per kepala keluarga/ per unit.
2. Kegiatan peningkatan kualitas yaitu pemberian dana tunai sebesar Rp. 5.000.000,- per kepala keluarga/ per unit.
3. Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yaitu pemberian dana tunai sebesar Rp. 4.000.000,-.

**a. Tujuan dan Lingkup Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Buku I: Petunjuk Pelaksanaan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (2011: 1-14)**

**1. Tujuan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

**2. Lingkup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Lingkup bantuan stimulan perumahan swadaya ialah sebagaimana disebutkan dalam tujuan di atas, adalah bantuan stimulan untuk:

- a. PB;
- b. PK; dan
- c. pembangunan PSU.

**b. Organisasi Pelaksana BSPS**

**1. Organisasi di Tingkat Pusat**

- a. Tim Pembina: terdiri dari Menteri Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya, dengan tugas dan tanggung jawab:
  1. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

- b. Tim Pelaksana: terdiri dari Satuan Kerja (SATKER) Penyedia Perumahan dan Kelompok Kerja (POKJA) Pusat, yang berkedudukan di Kementerian Perumahan Rakyat.

Tugas dan tanggung jawab SATKER Penyedia Perumahan:

1. Melaksanakan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran administrasi dan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab POKJA pusat:

1. Menyusun panduan tentang dasar-dasar perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya.
2. Melakukan koordinasi dan klarifikasi mengenai kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya, serta merekomendasikan hasil klarifikasi tersebut, baik kepada satuan kerja maupun instansi terkait.
3. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya.

Konsultan Manajemen Pusat (KMP), dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan koordinasi dengan Satker Penyediaan Perumahan dan KMW.
2. Menginventarisir data MBR penerima bantuan stimulan.
3. Mengusulkan pola penanganan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya.

## **2. Organisasi di Tingkat Provinsi**

1. Pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur, dengan tugas dan tanggung jawab: mengusulkan POKJA (Kelompok Kerja) provinsi untuk pelaksanaan pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya kepada Kementerian Perumahan Rakyat.
2. POKJA provinsi terdiri dari berbagai unsur instansi terkait di Bidang Perumahan. Struktur POKJA provinsi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan tugas dan tanggung jawab:
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberian BSPPS di kabupaten/kota.
  2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pekerjaan konsultan pendamping yang bertugas di wilayah kabupaten/kota.

3. Mendorong terciptanya harmonisasi di lapangan, menyangkut pelaksanaan kegiatan BSPS.
4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antara instansi penanggungjawab kegiatan yang mendukung dengan tim KMW.
5. Memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten/kota dan KMW yang ada di wilayah kerjanya.
6. Menyampaikan laporan bulanan Kegiatan BSPS kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Kepala Pusat Pengembangan Perumahan.

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Berkoordinasi dengan POKJA provinsi dan POKJA kabupaten/kota, dan dalam masalah fungsional KMW berkoordinasi dengan KMP.
2. Mengupayakan ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas pelaksanaan, ketepatan dan kualitas output kegiatan di wilayah kerjanya.
3. Mengupayakan ketepatan sasaran MBR penerima.
4. Mendorong kesiapan LKM/LKNB dalam pelaksanaan kegiatan BSPS bagi MBR.

5. Melakukan supervisi dan monitoring ke lokasi sasaran secara berkala.
6. Menyusun laporan berkala sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak.

### **3. Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota, dengan tugas dan tanggung jawab:
  - a. Merekomendasikan lokasi dan LKM/LKNB penyalur pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Menteri Perumahan Rakyat.
  - b. Mengusulkan POKJA kabupaten/kota kepada Kementerian Perumahan Rakyat.
2. POKJA kabupaten/kota terdiri dari berbagai unsur instansi terkait di bidang perumahan. Struktur POKJA kabupaten/kota terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, dengan tugas dan tanggung jawab:
  1. Mengusulkan lokasi kegiatan dan LKM/LKNB kepada bupati/walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Perumahan Rakyat.
  2. Mengupayakan ketepatan sasaran MBR penerima.

3. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung, dengan kegiatan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya.
4. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan BSPS.
5. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik mengenai keuangan maupun fisik.
6. Bersama Pemerintah kabupaten/kota, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan BSPS.

LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) adalah lembaga keuangan yang telah Berbadan Hukum dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali.

Tugas dan tanggung jawab LKM/LKNB:

1. Mengusulkan kelompok MBR calon penerima BSPS kepada POKJA kabupaten/kota.
2. Menyalurkan dana BSPS kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh POKJA kabupaten.
3. Melakukan koordinasi dalam proses penyusunan proposal MBR.
4. Memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan dan penyaluran BSPS kepada POKJA kabupaten/kota dan Satuan Kerja Penyedia Perumahan.

Fasilitator dengan tugas dan tanggung jawab:

1. Mendata MBR dan membentuk KSM untuk diusulkan kepada LKM/LKNB.
2. Membantu MBR dalam pembuatan usulan kegiatan.
3. Memberikan bantuan teknis dan administrasi, serta pengawasan dan pembinaan pada LKM/LKNB.
4. Bersama POKJA kabupaten/kota, membantu melakukan verifikasi MBR yang diprioritaskan dan direkomendasikan untuk mendapat dana bantuan stimulan.
5. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik kepada LKM/LKNB maupun MBR.
6. Memberikan laporan perkembangan dan permasalahan yang muncul di lapangan secara berkala, yang diserahkan kepada POKJA kabupaten/kota dan KMW.

### **c. Mekanisme Pelaksanaan**

#### **1. Persiapan**

- a) Penetapan lokasi: lokasi kegiatan BSPS adalah untuk perumahan sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

Kriteria MBR penerima bantuan:

1. Masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
2. Status tanah milik sendiri dan tidak bermasalah.



3. Menempati rumah dengan kategori tidak layak huni untuk PK dan belum memiliki rumah untuk PB.
  4. Bantuan Stimulan untuk PK dan PB diperuntukkan bagi rumah pertama.
  5. Untuk kegiatan PB disarankan lokasi MBR yang menyebar (d disesuaikan dengan kondisi lapangan), sementara kegiatan PK pada wilayah dengan kondisi kepadatan bangunan paling rendah 50 unit per hektar di perkotaan atau antara 30-50 unit di perdesaan.
- b) Fasilitator membantu pembentukan KSM yang beranggotakan 10-25 MBR.
  - c) POKJA melakukan verifikasi terhadap LKM/LKNB untuk diusulkan kepada bupati/walikota.
  - d) Hasil verifikasi LKM/LKNB direkomendasikan oleh bupati/walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada POKJA pusat untuk disahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

## **2. Pelaksanaan**

- 1) Sosialisasi:
  1. Tingkat Nasional diselenggarakan oleh POKJA pusat dibantu KMP. Pesertanya adalah POKJA provinsi dan KMW.

2. Tingkat provinsi diselenggarakan oleh POKJA provinsi dibantu KMW. Pesertanya adalah POKJA kabupaten/kota, dinas terkait dan korprov.
  3. Tingkat kabupaten diselenggarakan oleh POKJA kabupaten/kota dibantu KMW. Pesertanya adalah fasilitator dan LKM/LKNB.
  4. Tingkat masyarakat diselenggarakan oleh POKJA kabupaten/kota yang didampingi oleh fasilitator.
- 2) Persiapan Pencairan Dana
1. KSM menyusun usulan kegiatan MBR dan usulan kegiatan PSU yang disampaikan kepada LKM/LKNB.
  2. LKM/LKNB menyusun proposal yang merupakan rekapitulasi usulan kegiatan KSM untuk diverifikasi oleh POKJA kabupaten/kota.
  3. Proposal hasil verifikasi disampaikan ke SATKER Penyediaan Perumahan untuk diverifikasi kembali.
  4. LKM/LKNB membuat Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan PPK Penyedia Perumahan Swadaya dan Rumah Khusus yang diketahui oleh SATKER Penyedia Perumahan.
- 3) Pencairan Dana
1. Besaran Dana Stimulan
    - a. PB: Rp. 10.000.000,-.

- b. PK: Rp. 5.000.000,- untuk PSU, dikalikan jumlah unit rumah.
2. SATKER Penyediaan Perumahan membuat SPM kepada KPPN.
3. Pencairan dana melalui transfer dari KPPN ke rekening atas nama LKM/LKNB, untuk disalurkan kepada KSM/MBR.
4. Penyaluran dana stimulan perumahan swadaya dilakukan secara bertahap, yaitu:
  1. Tahap pertama 50% (lima puluh persen), apabila usulan dari masyarakat melalui LKM/LKNB telah memenuhi persyaratan dan disetujui.
  2. Tahap kedua 50% (lima puluh persen) sisanya, apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai minimum 30% (tiga puluh persen)
5. LKM/LKNB harus segeramenyalurkan dana langsung kepada MBR selambat-lambatnya 4 (empat hari kerja setelah dana diterima dalam rekening LKM/LKNB.

### **3. Administrasi Kegiatan**

- a. Untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana stimulan, dibutuhkan pencatatan dalam buku kas harian dengan didukung oleh bukti dan arsip yang terpisah dari kegiatan LKM/LKNB lainnya.

- b. Catatan pada buku kas harian digunakan untuk menyusun laporan bulanan LKM/LKNB yang menyangkut jumlah penerimaan dan pengeluaran uang.
- c. KSM-PSU membuat Buku Material (BM), berupa catatan penerimaan material, catatan penggunaan material dan catatan upah kerja.
- d. Catatan pada BM digunakan untuk menyiapkan laporan realisasi fisik PSU.

#### **4. Pelaporan**

- 1) **Laporan Bulanan** yang berisi *progress*, kendala-kendala yang dihadapi serta tindak lanjut kegiatan dalam satu bulan berjalan, disusun oleh:
  - a. LKM/LKNB menyusun dan menyampaikan kepada POKJA kabupaten/kota dan Satker Penyedia Perumahan, dengan dibantu oleh fasilitator.
  - b. POKJA kabupaten/kota yang disampaikan kepada Satker Penyedia Perumahan, dengan tembusan ke POKJA provinsi.
  - c. POKJA provinsi membuat rekapitulasi laporan POKJA kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Satker Penyedia Perumahan.

- d. POKJA pusat membuat rekapitulasi semua laporan POKJA kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Perumahan Rakyat.

2) **Laporan Akhir LKM/LKNB** disampaikan kepada Satker Penyedia Perumahan, yang berisi *progress*, kendala-kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya, dengan dilengkapi:

- a. Foto-foto dokumentasi kegiatan PB, PK, dan PSU tahap 0%, 30%, dan 100%. Pengambilan foto dokumentasi 0%, 30%, dan 100% dilakukan dari sudut atau sisi pengambilan yang sama.
- b. Untuk MBR yang melakukan perbaikan terhadap beberapa bagian rumahnya, seperti dinding, lantai, dan atap, dilakukan pengambilan foto dokumentasi terhadap semua objek yang akan diperbaiki. Foto dokumentasi yang diajukan dalam Proposal Termin I cukup 1 (satu) dengan nilai biaya konstruksi yang paling besar.
- c. Penyerahan laporan akhir LKM/LKNB paling lambat pada minggu kedua Desember 2011.

#### **d. Pengawasan , Pengendalian, dan Pengaduan**

##### **1. Pengawasan dan Pengendalian**

- a. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kebenaran prosedur dan pengendalian mutu, yang dilakukan terhadap administrasi keuangan dan administrasi lainnya, serta teknis bangunan dan lingkungan.
- b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh POKJA pusat, POKJA provinsi, dan POKJA kabupaten/kota terhadap LKM/LKNB dan MBR, untuk mengetahui perkembangan yang diharapkan.
- c. POKJA kabupaten /kota dan fasilitator melakukan monitoring dan pengawasan penyaluran dana oleh LKM/LKNB dan pemanfaatan dana oleh MBR.
- d. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu diperlukan, dapat dilakukan audit dana stimulan yang disalurkan ke LKM/LKNB.

##### **2. Pengaduan**

- a. Masyarakat atau pihak lain dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan kegiatan BSPS.
- b. Hal-hal yang bisa diadukan meliputi penyimpangan prosedur, penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana, kejadian yang mengarah ke kondisi *force majeure* (suatu keadaan yang terjadi

di luar kemampuan manusia, seperti akibat bencana alam, kerusuhan, atau kerusakan massal), berkaitan dengan adanya tindakan negatif yang merugikan masyarakat maupun kepentingan kegiatan lainnya.

c. Prosedur Pengaduan:

1. Jika penyelewengan dilakukan oleh KSM, maka pengaduan ditujukan kepada ketua LKM/LKNB dan fasilitator.
2. Jika penyelewengan dilakukan oleh LKM/LKNB, maka pengaduan ditujukan kepada POKJA kabupaten/kota dan fasilitator. Atas pengaduan tersebut, POKJA kabupaten/kota melakukan penyelesaian di daerah, dengan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada POKJA pusat dan SATKER Penyedia Perumahan, yang ditembuskan kepada POKJA provinsi.
3. Jika laporan penyelewengan LKM/LKNB tidak bisa diselesaikan oleh POKJA kabupaten/kota, maka POKJA kabupaten/kota meminta POKJA provinsi untuk melakukan penyelesaian, dengan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada POKJA pusat dan SATKER Penyediaan Perumahan.
4. Jika laporan penyelewengan LKM/LKNB tersebut juga tidak bisa diselesaikan oleh POKJA provinsi, maka penyelesaian akan dilakukan oleh POKJA pusat dan SATKER Penyediaan Perumahan.

d. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani pengaduan:

1. Identitas pelapor harus dirahasiakan.

2. Sebelum pengaduan tersebut ditangani, harus dilakukan uji silang untuk mendapatkan kepastian permasalahan.
3. Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasusnya, misalnya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur.
4. Penanganan pengaduan harus mempertimbangkan resiko luasan dampak yang akan muncul. Pengaduan yang muncul dan tindak lanjut penanganan, baik yang telah ditangani maupun yang sedang dalam proses penanganan oleh masing-masing jenjang, dilaporkan sebagai kelengkapan dari laporan bulanan yang dilaksanakan secara berjenjang.

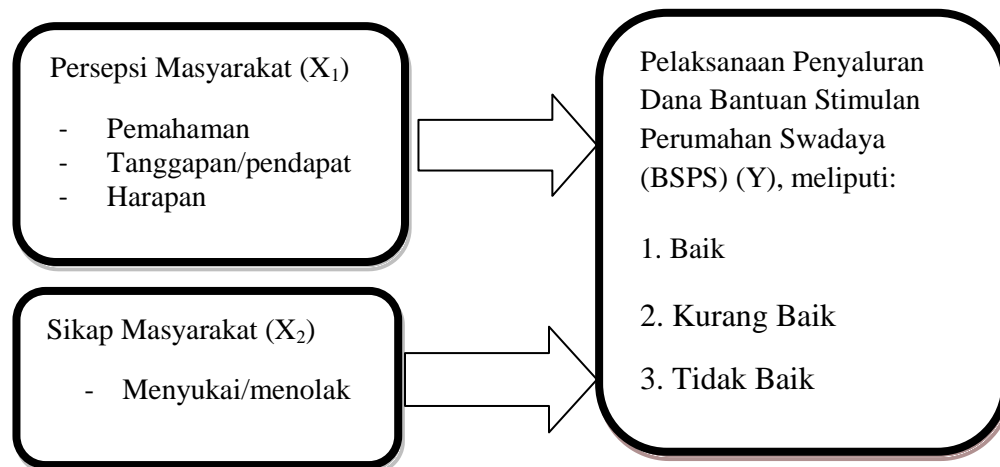
## **B. Kerangka Pikir**

Persepsi merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek yang dapat berubah-ubah, misalnya dari baik menjadi tidak baik dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: perhatian, lingkungan, sistem nilai, dan kepribadian seseorang. Dari persepsi maka dapat ditindaklanjuti oleh sikap dan perbuatan dimana sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku terhadap suatu objek yang dapat menimbulkan perasaan menyukai atau menolak suatu objek, sikap sangat menentukan cara hidup seseorang dalam bermasyarakat. Dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat yang berpenghasilan rendah maka Kementerian Perumahan Rakyat telah mencanangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat



berpenghasilan rendah. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang berakibat pada sikap yang buruk terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kerangka pikir tersebut adalah:



### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan penelitian fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. (Hadari Nawawi, 1996: 73), oleh karena itu penulis ingin menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai persepsi dan sikap masyarakat sasaran terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

Penelitian ini sangat tepat menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis data statistik yang menggunakan angka-angka, karena jenis variabel yang akan diteliti dapat digambarkan atau dijelaskan dengan perhitungan statistik dengan skala interval.

#### **B. Populasi**

Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu keseluruhan masyarakat yang menjadi sasaran program penyaluran dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 41 orang Kepala Keluarga (KK), yang didukung oleh pendapat Arikunto bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Adapun rincian masyarakat yang menjadi sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3** Daftar nama Kepala Keluarga (KK) yang menerima BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011

No	Jenis Kegiatan	Jumlah KK
1.	Pembangunan Baru (PB)	37 KK
2.	Peningkatan Kualitas (PK)	4 KK
<b>Jumlah</b>		<b>41 KK</b>

Sumber: Lembaga Keuangan Mikro Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011.

### C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, Definisi Operasional dan Rencana Pengukuran

#### 1. Variabel Penelitian

- a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau (X) dalam penelitian ini ada 2 variabel bebas yaitu:

1) Persepsi masyarakat ( $X_1$ )

1. Pemahaman
2. Tanggapan/pendapat
3. Harapan

2) Sikap Masyarakat ( $X_2$ )

1. Menyukai/menolak

b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau (Y) dalam penelitian ini hanya ada 1 variabel terikat, yaitu Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Y), yaitu:

1. Baik
2. Kurang baik
3. Tidak baik

## **2. Definisi Konseptual Variabel**

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan mempergunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukkan descriptor dan indikatornya dan bagaimana mengukurnya (Amirin, 2010: 10).

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Persepsi masyarakat terhadap BSPS adalah pemahaman, tanggapan/pendapat, dan harapan. Selanjutnya sikap masyarakat terhadap BSPS adalah menyukai/menolak.

### 3. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengambil objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat adalah cara pandang atau tanggapan seseorang dalam suatu masyarakat terhadap suatu objek yang diamati melalui proses penginderaan yang berasal dari kondisi seseorang sehingga seseorang akan mempunyai gambaran yang dapat dinyatakan dalam perilaku terhadap objek tertentu, indikator-indikator yang akan diukur adalah pemahaman, tanggapan/pendapat, dan harapan masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- b. Sikap masyarakat adalah kecenderungan sekelompok orang dalam lingkungan masyarakat untuk bertingkah laku terhadap suatu objek tertentu serta kesiapan seseorang untuk bertindak terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Indikator-indikator yang akan diukur adalah menyukai/menolak sikap masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- c. Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah proses pemberian dana dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKKNB) pada masing-masing daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni.

Berkaitan dengan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maka indikatornya adalah:

1. Baik
2. Kurang baik
3. Tidak baik

#### **4. Rencana Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator dalam penelitian yaitu:

##### **a. Variabel Bebas (X)**

##### **1. Persepsi Masyarakat terhadap Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (X<sub>1</sub>)**

Untuk variabel persepsi masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan indikator pemahaman, tanggapan/pendapat, dan harapan dengan pengukuran baik, kurang baik dan tidak baik.

##### **2. Sikap Masyarakat terhadap Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (X<sub>2</sub>)**

Pengukuran sikap masyarakat dengan menggunakan angket sikap, indikatornya adalah menyukai/menolak sikap masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bentuk nilai setuju/menyukai, ragu-ragu, dan tidak setuju/menolak.

## **b. Variabel Terikat (Y)**

Variabel terikat (Y) adalah pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Indikator variabel terikat ini adalah:

1. Baik
2. Kurang baik
3. Tidak baik

Untuk mengukurnya dengan menggunakan angket dan memberikan beberapa pertanyaan dengan alternatif jawaban setuju, kurang setuju, dan tidak setuju.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pokok**

#### **a. Angket Skala Sikap**

Teknik angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan responden. Dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Sasaran angket adalah masyarakat desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Angket dalam penelitian ini dipakai untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap BSPS, karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor

nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis. Masing-masing alternative diberi skor:

- a. Skor 3 untuk jawaban baik.
- b. Skor 2 untuk jawaban kurang baik.
- c. Skor 1 untuk jawaban tidak baik.

Skala sikap yang digunakan adalah skala sikap Linkert. Skala sikap Linkert menggunakan teknik konstruksi tes yang lain. Selanjutnya skala Linkert ini dikemas dalam bentuk angket yang akan digunakan untuk mengukur sikap masyarakat terhadap BPS. Masing-masing responden diminta melakukan agreement atau disagreeemenn-nya untuk masing-masing item dalam skala yang terdiri dari 5 poin (sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju). Namun di sederhanakan lagi oleh John West menjadi 3 option yaitu setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju.

Setiap angket skala sikap memiliki tiga alternatif jawaban yaitu (a), (b), (c), dan masing-masing mempunyai skor atau bobot nilai yang berbeda.

Menurut Natsir (1999: 403) yaitu:

1. jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor tiga (3)
2. jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor dua (2)



3. jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor satu (1)

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui nilai tertinggi adalah tiga (3) dan nilai terendah adalah satu (1). Dengan menggunakan tiga jawab yaitu setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju.

## **2. Teknik Penunjang**

### **a. Wawancara**

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap dan mengumpulkan data yang diperoleh dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yang berada di lingkungan Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tentang penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2011. Data yang diperoleh sebagai data pelengkap.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat hasil laporan kegiatan, catatan kegiatan, arsip-arsip yang berhubungan dengan program penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2011.

## **E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Untuk menentukan validasi item dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *logical validity* yang dibagi menjadi dua yaitu *construct validity* dan *contents validity*.

Untuk mengukur validitas persepsi dan sikap masyarakat menggunakan *construct validity* yaitu melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket.

Sedangkan untuk mengukur validitas penyaluran Dana BPS dengan menggunakan uji validitas *contents validity* yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan antara instrumen dengan materi yang terdapat dalam kebijakan Penyaluran Dana BPS.

### **2. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas (*reliability*) berhubungan dengan konsistensi. Suatu instrument disebut *reliable* apabila instrument tersebut konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur. Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 151) “Untuk membuktikan kemantapan alat pengumpulan data akan diadakan uji

coba angket, reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpulan data instrument tersebut sudah baik.

Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur dapat dipakai atau tidak maka diadakan suatu uji coba angket dengan teknik belah dua dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada 10 orang di luar responden.
2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau ganjil genap.
3. Kemudian mengkorelasi kelompok ganjil dan genap dengan korelasi

Product Moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = hubungan variabel X dan Y

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

N = Jumlah responden

(Suharsimi Arikunto, 1998: 256)

4. Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus *Spearman brown* (Sutrisno Hadi, 2008: 37) agar diketahui koefisien seluruh item yaitu :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = Koefisien reliabilitas seluruh tes

$r_{gg}$  = Koefisien korelasi *item ganjil genap*

Adapun kriteria realibel (Manasse Mallo, 1986: 139) adalah sebagai berikut:

0,90-1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50- 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00- 0,49 = Reliabilitas rendah

## F. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan suatu analisis data kuantitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis, selanjutnya menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Dimana :

$I$  = Interval

$NT$  = Nilai Tertinggi

$NR$  = Nilai Terendah

$K$  = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase (Moh. Ali, 1993: 184) digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = besarnya persentase

F = jumlah alternatif seluruh item

N = jumlah perkalian antar item dan responden

Untuk menafsirkan hasil presentase diperoleh kriteria sebagai berikut:

75% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Tidak Baik

(Suharsimi Arikunto, 1986: 196)

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk persiapan sebelum melakukan penelitian yang bersifat sistematis meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan dilapangan dengan tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, dalam langkah penelitian dan penulisan skripsi ini penulis melakukan kegiatan melalui langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

#### **1. Persiapan Pengajuan Judul**

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengajukan judul penelitian kepada dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung, pilihan judul pertama yang kemudian disetujui pada tanggal 30 Januari 2012 dan sekaligus ditentukan dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.

#### **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah judul penelitian disetujui oleh pembimbing akademik dan ketua program studi PPKn, dan peneliti mendapatkan izin penelitian pendahuluan

dari dekan FKIP pada Februari 2012 dengan No.821/UN26/3/PL/2012, maka penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan ke Desa Madukoro Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara.

Adapun maksud dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data, serta memperoleh gambaran secara umum tentang berbagai hal yang akan diteliti dalam menyusun proposal penelitian ini yaitu mengenai Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012.

### **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Rencana penelitian dilakukan melalui proses konsultasi sebagai salah satu prosedur untuk memperoleh persetujuan untuk melaksanakan persetujuan proposal. Melalui beberapa perbaikan, proposal akhirnya disetujui oleh pembimbing II (pembantu) pada tanggal 20 Februari 2012 dan pembimbing I (utama) pada tanggal 28 Februari 2012, lalu seminar proposal pada tanggal 6 Maret 2012. Adapun tujuan diadakan seminar tersebut adalah untuk memperoleh masukan, saran, dan kritik, demi kesempurnaan skripsi ini. Setelah mengadakan seminar, penulis lalu melakukan perbaikan sesuai dengan masukan, saran, dan kritik dari dosen pembahas. Kemudian penulis mengajukan pengesahan komisi Pembimbing I (Utama) dan Pembimbing II (Pembantu) yang disetujui oleh Ketua Program Studi PPKn, Ketua Jurusan

Pendidikan IPS, dan selanjutnya disahkan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung.

#### **4. Pelaksanaan Penelitian**

##### **1. Persiapan Administrasi**

Membawa surat izin penelitian yang telah disetujui oleh Pembantu Dekan I pada Maret 2012 dengan Nomor: 2113/UN26/3/PL/2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Madukoro Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara.

##### **2. Penyusunan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa angket tertutup, ditujukan kepada 41 responden. Jumlah item pertanyaan adalah 25 soal, terdiri dari 3 alternatif jawaban. Dalam penyusunan angket, langkah-langkahnya adalah:

- a. Membuat kisi-kisi angket mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2012.
- b. Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan bimbingan dan persetujuan.
- c. Setelah angket disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II, maka angket siap disebarakan kepada 10 masyarakat di luar



responden, setelah diuji reliabilitasnya, angket tersebut kemudian diberikan kepada responden yang sebenarnya.

### **3. Penelitian Di Lapangan**

Pelaksanaan penelitian di lapangan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2012 sampai dengan 7 April 2012 dengan menyebarkan angket kepada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **5. Analisis Uji Coba Angket**

### **1) Analisis Uji Validitas**

Untuk uji coba validitas angket penulis melakukan control langsung terhadap indicator-indikator yang ada dalam penelitian ini dengan jalan berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ada di lingkungan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### **2) Analisis Uji Coba Reliabilitas**

Uji coba angket ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui reliabilitas alat ukur yang digunakan, yaitu dengan cara menyebarkan angket kepada 10 masyarakat di luar responden.



<b>6</b>	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>32</b>
<b>7</b>	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>32</b>
<b>8</b>	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	<b>32</b>
<b>9</b>	2	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>31</b>
<b>10</b>	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>32</b>
<b><math>\Sigma Y</math></b>													<b>321</b>

Sumber: Analisis Data Primer

Dari data tabel 5 diketahui  $\Sigma Y = 321$  yang merupakan hasil penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian

**Tabel 6.** Tabel kerja antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di desa madukoro kecamatan kotabumi utara kabupaten lampung utara tahun 2012.

<b>No</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X<sup>2</sup></b>	<b>Y<sup>2</sup></b>	<b>XY</b>
1.	38	35	1444	1225	1330
2.	29	29	841	841	841
3.	29	31	841	961	899
4.	34	32	1156	1024	1088
5.	39	35	1521	1225	1365
6.	33	32	1089	1024	1056
7.	33	32	1089	1024	1056
8.	31	32	961	1024	992
9.	30	31	900	961	930
10.	33	32	1089	1024	1056
<b>Jumlah</b>	<b>329</b>	<b>321</b>	<b>10931</b>	<b>10333</b>	<b>10613</b>

Sumber: Analisis Data Primer

Data tabel 6 merupakan hasil dari penggabungan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil (X) dengan genap (Y). Hasil

keseluruhan dari tabel kerja uji coba angket antara item ganjil (X) dengan genap (Y) akan dikorelasikan menggunakan rumus *Product Moment* guna mengetahui besarnya koefisien korelasi instrumen penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan dan diolah dengan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{10613 - \frac{(329)(321)}{10}}{\sqrt{\left\{ 10931 - \frac{(329)^2}{10} \right\} \left\{ 10333 - \frac{(321)^2}{10} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{10613 - 10560,9}{\sqrt{(10931 - 10824,1)(10333 - 10304,1)}}$$

$$r_{xy} = \frac{52,1}{(106,9)(28,9)}$$

$$r_{xy} = \frac{52,1}{\sqrt{3089,41}}$$

$$r_{xy} = \frac{52,1}{55,7}$$

$$r_{xy} = 0,93$$

Selanjutnya untuk mencari reliabilitasnya alat ukur ini maka dilanjutkan dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* agar diketahui seluruh item dengan langkah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

$$r_{xy} = \frac{2(0,93)}{1 + 0,93}$$

$$r_{xy} = \frac{1,86}{1,93}$$

$$r_{xy} = 0,97$$

Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian penulis mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas sebagai berikut:

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat diketahui tingkat reliabilitasnya berdasarkan pada criteria yang dikemukakan oleh Manase Mallo yang mana hasil angket termasuk dalam kategori “tinggi” yaitu terletak antara 0,90-1,00.

Dengan demikian angket mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dapat dipergunakan dalam penelitian ini.

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **a. Gambaran Umum Desa Madukoro**

Desa Madukoro merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Letak Desa Madukoro berjarak 14 kilometer dari ibukota kabupaten, saat ini desa Madukoro dikepalai oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Hi. Sanusi.

Pada umumnya masyarakat Desa Madukoro bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, peternak, anggota TNI/POLRI, pengrajin industry rumah tangga serta sopir.

Desa Madukoro mayoritas penduduknya adalah suku jawa dan memeluk ajaran agama Islam. Desa Madukoro berpenduduk sebanyak 5471 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2859 jiwa dan perempuan sebanyak 2622 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1265 KK.

Sarana pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan:

1. Gedung Taman Kanak-kanak (TK) : 1 buah
2. Gedung PAUD : 1 buah
3. Gedung SDN : 5 buah
4. Gedung SMP : 2 buah
5. Gedung SMA : 5 buah

Sarana tempat ibadah:

1. Masjid : 12 buah
2. Mushola : 8 buah
3. Gereja : 1 buah

Klasifikasi tingkat pendidikan yang masih belajar di bangku sekolah:

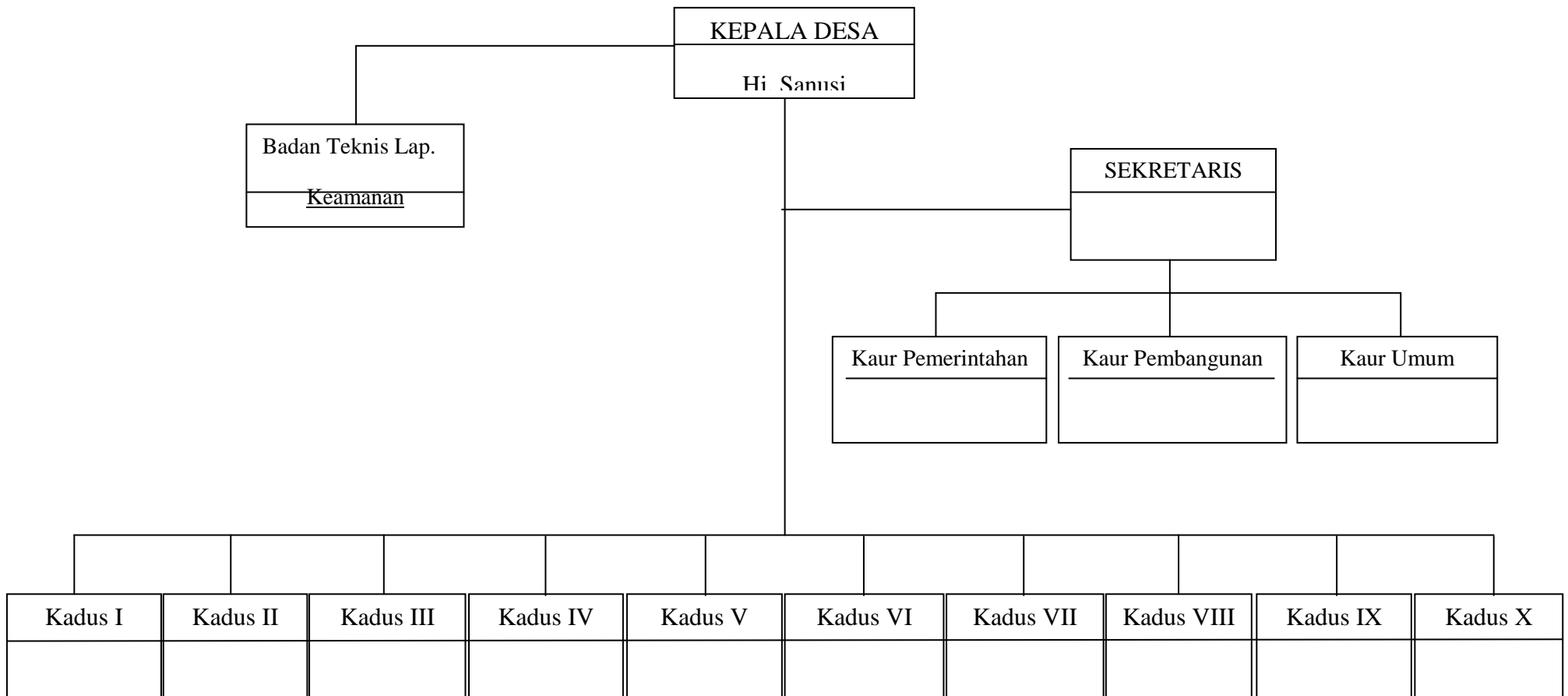
1. TK : 231 orang
2. SD : 457 orang
3. SMP : 328 orang
4. SMA : 306 orang
5. Diploma : 77 orang
6. Sarjana : 92 orang

**b. Letak Geografis Desa Madukoro**

Desa Madukoro merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan luas wilayah  $\pm 7000 \text{ ha/m}^2$  yang terdiri dari 10 dusun dan tipologi desa, isi batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sawojajar.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Madukoro Baru.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Talang Jali.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjar Wangi.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN  
DESA MADUKORO  
KECAMATAN KOTABUMI UTARA





## **C. Deskripsi Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Setelah diadakan uji coba angket dan diketahui tingkat reliabilitasnya. Sebagai alat ukur dalam penelitian ini, maka selanjutnya peneliti mengadakan penelitian dengan menyebar angket kepada responden yaitu yang berjumlah 41 orang yang mendapatkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

### **2. Penyajian Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan angket, kemudian dibuat distribusi skor hasil angket dari masing-masing indikator mengenai Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012.

#### **a. Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dengan Indikator Pemahaman.**

Terkait penyajian data mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam bentuk pemahaman, dengan item soal 5 soal. Maka akan diperoleh nilai tertinggi adalah 15 dan nilai terendah adalah 5. Nilai diperoleh dari mengalikan jumlah item soal dengan skor yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu skor tertinggi untuk 1 soal adalah 3, dan skor terendah adalah 1.

**Tabel 7. Distribusi skor angket dari indikator pemahaman**

No.	Nomor Soal					Skor
	1	2	3	4	5	
1.	3	3	1	3	3	13
2.	3	3	3	3	3	15
3.	3	3	3	3	3	15
4.	3	2	2	2	2	11
5.	3	3	2	2	1	11
6.	3	3	3	2	3	14
7.	3	3	3	2	2	13
8.	3	3	3	3	3	15
9.	3	3	2	2	2	12
10.	2	2	2	2	2	10
11.	2	2	2	2	2	10
12.	2	2	2	2	2	10
13.	2	2	2	2	2	10
14.	2	2	2	2	2	10
15.	2	2	2	2	2	10
16.	2	2	2	2	2	10
17.	3	2	2	2	2	11
18.	3	3	3	3	3	15
19.	3	2	2	2	2	11
20.	2	2	3	3	2	12
21.	3	3	3	3	3	15
22.	3	3	2	2	2	12
23.	2	2	2	1	2	9
24.	2	2	3	2	2	11
25.	3	3	3	2	2	13
26.	3	3	2	2	2	12
27.	3	3	3	3	3	15
28.	3	3	2	2	1	11
29.	3	3	2	2	2	12
30.	3	3	2	2	2	12
31.	3	2	3	2	2	12
32.	3	2	1	2	2	10
33.	3	3	2	2	2	12
34.	3	3	3	2	3	14
35.	3	3	3	3	3	15
36.	3	3	3	3	3	15
37.	3	3	3	3	3	15
38.	3	2	3	1	2	11
39.	3	3	3	1	3	13
40.	2	2	3	3	1	11
41.	3	3	2	2	2	12

Sumber: Analisis data angket penelitian 2012

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator pemahaman nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 9. Kemudian untuk mencari panjang interval digunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{3}$$

$$I = \frac{15 - 9}{3}$$

$$I = \frac{6}{3}$$

$$I = 2$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut:

13 – 15 adalah kategori baik

11 – 12 adalah kategori kurang baik

9 – 10 adalah tidak baik

Setelah didapatkan interval dari skor indikator pemahaman, maka skor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 8. Distribusi skor hasil angket dari indikator pemahaman**

No. Responden	Skor	Kategori
1.	13	Baik
2.	15	Baik
3.	15	Baik
4.	11	Kurang baik
5.	11	Kurang baik
6.	14	Baik
7.	13	Baik
8.	15	Baik
9	12	Kurang baik
10.	10	Tidak baik
11.	10	Tidak baik
12.	10	Tidak baik

13.	10	Tidak baik
14.	10	Tidak baik
15.	10	Tidak baik
16.	10	Tidak baik
17.	11	Kurang baik
18.	15	Baik
19.	11	Kurang baik
20.	12	Kurang baik
21.	15	Baik
22.	12	Kurang baik
23.	9	Tidak baik
24.	11	Kurang baik
25.	13	Baik
26.	12	Kurang baik
27.	15	Baik
28.	11	Kurang baik
29.	12	Kurang baik
30.	12	Kurang baik
31.	12	Kurang baik
32.	10	Tidak baik
33.	12	Kurang baik
34.	14	Baik
35.	15	Baik
36.	15	Baik
37.	15	Baik
38.	11	Kurang baik
39.	13	Baik
40.	11	Kurang baik
41.	12	Kurang baik

Sumber: Analisis data distribusi skor angket 2012

Berikut hasil distribusi frekuensi dari indikator pemahaman setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase Suharsimi Arikunto, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{41} \times 100\%$$

$$= 36,58\%$$

$$= \frac{17}{41} \times 100\%$$

$$= 41,46\%$$

$$= \frac{9}{41} \times 100\%$$

$$= 21,95\%$$

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator pemahaman.

**Tabel 9. Distribusi frekuensi dari indikator pemahaman**

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	13-15	15	36,58%
2.	Kurang baik	11-12	17	41,46%
3.	Tidak baik	9-10	9	21,95%
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi 2012

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 36,58% menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dari indikator pemahaman mengenai apa saja yang termasuk kedalam program BSPS baik mengenai tujuan, lingkup dan sasaran BSPS masuk dalam kategori baik/paham, hal ini terlihat dari jawaban responden yang baik/memahami terkait pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan implementasinya dalam bentuk pemahaman.

Sebanyak 17 responden atau 41,46% menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan di Desa Madukoro dalam bentuk pemahaman masuk dalam kategori kurang baik/kurang paham mengenai tujuan, lingkup, sasaran dan segala sesuatu yang menyangkut program BSPS. Ini dikarenakan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap program

BSPS, dan hal ini juga dapat disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia dalam mensosialisasikan program BSPS. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang memahami mengenai teori program BSPS.

Kemudian sebanyak 9 orang atau sekitar 21,95% menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam bentuk pemahaman terhadap tujuan, lingkup, maupun sasaran dari pemberian BSPS masuk dalam kategori tidak paham. Hal ini dikarenakan mereka tidak ada respon positif terhadap tujuan sosialisasi atau bahkan mereka enggan mengetahui tentang tujuan dan lingkup pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Hal ini mengakibatkan program BSPS tidak dapat dipahami oleh responden secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan, lingkup, serta sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan pada September 2011 di Desa Madukoro teorinya kurang dipahami oleh masyarakat yang diakibatkan oleh lemahnya pengetahuan mereka, kurangnya kesadaran diri untuk mengetahui dan sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kurang tepat pada sasaran.

**b. Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dengan Indikator Pendapat/Tanggapan**

Terkait penyajian data mengenai persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam bentuk pendapat/tanggapan, dengan item pertanyaan 5 soal. Maka akan diperoleh nilai tertinggi adalah 15

dan nilai terendah adalah 5. Nilai diperoleh dari mengalikan jumlah item soal dengan skor yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana skor tertinggi untuk 1 soal adalah 3, dan skor terendah adalah 1.

**Tabel 10. Distribusi skor angket dari indikator pendapat/tanggapan**

No.	Nomor Soal					Skor
	6	7	8	9	10	
1.	3	3	3	3	3	15
2.	3	3	3	3	3	15
3.	3	3	3	3	3	15
4.	3	3	3	3	2	14
5.	3	2	3	2	2	12
6.	3	3	3	3	3	15
7.	3	3	3	3	3	15
8.	3	3	3	3	3	15
9.	3	3	3	3	2	14
10.	3	3	3	3	3	15
11.	3	3	3	3	3	15
12.	3	3	3	3	3	15
13.	3	3	3	3	3	15
14.	3	3	3	3	3	15
15.	3	3	3	3	3	15
16.	3	3	3	3	3	15
17.	3	3	3	3	2	14
18.	3	3	3	3	3	15
19.	3	3	3	3	2	14
20.	3	3	3	3	3	15
21.	3	3	3	3	3	15
22.	3	3	2	2	3	13
23.	3	3	2	2	2	12
24.	3	3	3	3	2	14
25.	3	2	2	3	2	12
26.	3	2	2	3	2	13
27.	3	1	2	2	1	9
28.	3	3	2	2	2	12
29.	3	3	3	2	3	14
30.	3	3	2	3	2	13
31.	3	3	3	2	2	13
32.	3	3	3	3	3	15
33.	3	3	2	2	3	13
34.	3	3	2	3	3	14
35.	3	3	3	3	3	15
36.	3	3	2	3	3	14

<b>37.</b>	3	3	3	3	3	<b>15</b>
<b>38.</b>	3	2	3	3	2	<b>13</b>
<b>39.</b>	3	3	3	3	3	<b>15</b>
<b>40.</b>	3	3	3	3	3	<b>15</b>
<b>41.</b>	3	3	2	3	2	<b>13</b>

Sumber: Analisis data angket penelitian tahun 2012

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator pendapat/tanggapan nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 9. Kemudian untuk mencari panjang interval digunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{3}$$

$$I = \frac{15 - 9}{3}$$

$$I = \frac{6}{3}$$

$$I = 2$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut:

13 – 15 adalah kategori baik

11 – 12 adalah kategori kurang baik

9 – 10 adalah tidak baik

Setelah didapatkan interval dari skor indikator pendapat/tanggapan, maka skor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 11. Distribusi skor hasil angket dari indikator pendapat/tanggapan**

<b>No. Responden</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
<b>1.</b>	15	Baik
<b>2.</b>	15	Baik
<b>3.</b>	15	Baik
<b>4.</b>	14	Baik
<b>5.</b>	12	Kurang baik
<b>6.</b>	15	Baik



7.	15	Baik
8.	15	Baik
9	14	Baik
10.	15	Baik
11.	15	Baik
12.	15	Baik
13.	15	Baik
14.	15	Baik
15.	15	Baik
16.	15	Baik
17.	14	Baik
18.	15	Baik
19.	14	Baik
20.	15	Baik
21.	15	Baik
22.	13	Baik
23.	12	Kurang baik
24.	14	Baik
25.	12	Kurang baik
26.	13	Baik
27.	9	Tidak baik
28.	12	Kurang baik
29.	14	Baik
30.	13	Baik
31.	13	Baik
32.	15	Baik
33.	13	Baik
34.	14	Baik
35.	15	Baik
36.	14	Baik
37.	15	Baik
38.	13	Baik
39.	15	Baik
40.	15	Baik
41.	13	Baik

Sumber: Analisis data distribusi skor angket 2012

Berikut hasil distribusi frekuensi dari indikator pendapat/tanggapan setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase Suharsimi Arikunto, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{36}{41} \times 100\%$$

$$= 87,80\%$$

$$= \frac{4}{41} \times 100\%$$

$$= 9,75\%$$

$$= \frac{1}{41} \times 100\%$$

$$= 2,43\%$$

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator pendapat/tanggapan.

**Tabel 12. Distribusi frekuensi dari indikator pendapat/tanggapan**

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	13-15	36	87,80 %
2.	Kurang baik	11-12	4	9,75 %
3.	Tidak baik	9-10	1	2,43 %
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi 2012

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 36 responden atau 87,80% menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dalam bentuk pendapat/tanggapan terhadap prosedur pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan pada bulan November tahun 2011 yaitu masuk dalam kategori pendapat yang baik, hal ini terlihat dari jawaban responden yang baik terkait konsep dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai suatu bentuk pendapat.

Sedangkan sebanyak 4 responden atau 9,75% menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 dalam bentuk pendapat/tanggapan masuk dalam kategori pendapat/tanggapan yang kurang baik mengenai proses serta prosedur pelaksanaan pemberian bantuan. Ini dikarenakan kurang adilnya panitia dalam proses pendataan masyarakat yang berhak menerima dana BSPS. Hal ini mengakibatkan persepsi masyarakat kurang baik terhadap pelaksanaan program BSPS dalam bentuk tanggapan/pendapat. Sementara untuk responden yang berpendapat tidak baik mengenai pelaksanaan program BSPS di Desa Madukoro yaitu sebanyak 1 orang responden atau 2,43 %. Hal ini dikarenakan bahwa tidak adilnya panitia dalam mendata masyarakat yang menjadi sasaran, atau dengan kata lain panitia melakukan praktek Kolusi dalam mendata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam praktek di lapangan berdasarkan wawancara oleh salah seorang responden bahwa panitia lebih mendahului keluarga mereka untuk mendapatkan bantuan daripada masyarakat yang lebih berhak menerima. Selanjutnya ditemui di lapangan bahwa tidak meratanya masyarakat yang menjadi sasaran. Jadi dampak dari hal tersebut anggapan masyarakat yang tidak baik.

**c. Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dengan Indikator Harapan**

Terkait penyajian data mengenai persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam bentuk harapan, dengan item pertanyaan 5 soal. Maka akan diperoleh nilai tertinggi adalah 15 dan nilai terendah adalah 5. Nilai diperoleh dari mengalikan jumlah item soal dengan

skor yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana skor tertinggi untuk 1 soal adalah 3, dan skor terendah adalah 1.

**Tabel 13. Distribusi skor angket dari indikator harapan**

No.	Nomor Soal					Skor
	11	12	13	14	15	
1.	3	3	3	3	3	15
2.	3	3	3	3	3	15
3.	3	3	3	3	3	15
4.	3	3	3	3	3	15
5.	3	2	3	3	2	13
6.	3	3	3	3	3	15
7.	3	3	3	3	3	15
8.	3	3	3	3	3	15
9.	3	3	3	3	3	15
10.	3	3	3	3	3	15
11.	3	3	3	3	3	15
12.	3	3	3	3	3	15
13.	3	3	3	3	3	15
14.	3	3	3	3	3	15
15.	3	3	3	3	3	15
16.	3	3	3	3	3	15
17.	3	3	3	3	3	15
18.	3	3	3	3	3	15
19.	3	3	3	3	3	15
20.	3	3	3	3	3	15
21.	3	3	3	3	3	15
22.	3	3	3	2	2	13
23.	3	3	2	2	3	13
24.	3	3	3	3	3	15
25.	3	3	3	3	3	15
26.	3	3	3	3	1	13
27.	3	2	1	1	2	9
28.	3	3	3	2	3	14
29.	3	2	2	2	3	12
30.	3	3	3	3	2	14
31.	3	3	3	3	3	15
32.	3	3	3	3	3	15
33.	3	3	3	3	3	15
34.	3	3	2	3	3	14
35.	3	3	3	3	3	15
36.	3	3	3	3	3	15
37.	3	3	3	3	3	15
38.	3	3	3	3	3	15
39.	3	3	1	3	1	11

<b>40.</b>	3	3	3	3	3	<b>15</b>
<b>41.</b>	3	3	3	3	3	<b>15</b>

Sumber: Analisis data angket penelitian tahun 2012

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator harapan nilai tertinggi 15 dan nilai terendah 9. Kemudian untuk mencari panjang interval digunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{3}$$

$$I = \frac{15 - 9}{3}$$

$$I = \frac{6}{3}$$

$$I = 2$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut:

13 – 15 adalah kategori baik

11 – 12 adalah kategori kurang baik

9 – 10 adalah tidak baik

Setelah didapatkan interval dari skor indikator harapan, maka skor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 14. Distribusi skor hasil angket dari indikator harapan**

<b>No. Responden</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
<b>1.</b>	15	Baik
<b>2.</b>	15	Baik
<b>3.</b>	15	Baik
<b>4.</b>	15	Baik
<b>5.</b>	13	Baik
<b>6.</b>	15	Baik
<b>7.</b>	15	Baik
<b>8.</b>	15	Baik
<b>9</b>	15	Baik

10.	15	Baik
11.	15	Baik
12.	15	Baik
13.	15	Baik
14.	15	Baik
15.	15	Baik
16.	15	Baik
17.	15	Baik
18.	15	Baik
19.	15	Baik
20.	15	Baik
21.	15	Baik
22.	13	Baik
23.	13	Baik
24.	15	Baik
25.	15	Baik
26.	13	Baik
27.	9	Tidak baik
28.	14	Baik
29.	12	Kurang baik
30.	14	Baik
31.	15	Baik
32.	15	Baik
33.	15	Baik
34.	14	Baik
35.	15	Baik
36.	15	Baik
37.	15	Baik
38.	15	Baik
39.	11	Kurang baik
40.	15	Baik
41.	15	Baik

Sumber: Analisis data distribusi skor angket 2012

Berikut hasil distribusi frekuensi dari indikator harapan setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase Suharsimi Arikunto, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{F}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{38}{41} \times 100\% \\
 &= 92,68\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{41} \times 100\%$$

$$= 4,87\%$$

$$= \frac{1}{41} \times 100\%$$

$$= 2,43\%$$

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator harapan.

**Tabel 15. Distribusi frekuensi dari indikator harapan**

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	13 – 14	38	92,68%
2.	Kurang baik	11 – 12	2	4,87%
3.	Tidak baik	9 – 10	1	2,43%
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi 2012

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 38 responden atau 92,68% menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dalam bentuk harapan yaitu masyarakat memiliki harapan yang baik agar program BPS terus dilaksanakan. hal ini terlihat dari jawaban responden yang baik terkait konsep dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai suatu bentuk harapan.

Sebanyak 2 responden atau 4,87% dan 1 orang responden atau 2,43% menyatakan bahwa kurangnya harapan masyarakat terhadap program BPS. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa proses pendataan yang dilakukan oleh panitia kurang adil dan tidak semua dusun dijadikan sasaran bantuan. Hal ini dapat mengakibatkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap panitia pelaksana





<b>22.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>23.</b>	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	<b>21</b>
<b>24.</b>	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	<b>26</b>
<b>25.</b>	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	<b>26</b>
<b>26.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>27.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>28.</b>	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	<b>24</b>
<b>29.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>30.</b>	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	<b>27</b>
<b>31.</b>	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>29</b>
<b>32.</b>	3	1	3	2	1	3	3	3	3	2	<b>24</b>
<b>33.</b>	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	<b>26</b>
<b>34.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>35.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>36.</b>	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>29</b>
<b>37.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>38.</b>	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	<b>24</b>
<b>39.</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<b>30</b>
<b>40.</b>	3	1	3	3	3	1	3	3	1	3	<b>24</b>
<b>41.</b>	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	<b>28</b>

Sumber: Analisis data angket penelitian tahun 2012

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa untuk indikator menyukai/menolak nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 21 Kemudian untuk mencari panjang interval digunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{3}$$

$$I = \frac{30 - 21}{3}$$

$$I = \frac{9}{3}$$

$$I = 3$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut:

27 – 30 adalah kategori setuju/menyukai

24 – 26 adalah kategori ragu-ragu

21 – 23 adalah tidak setuju/menolak

Setelah didapatkan interval dari skor indikator harapan, maka skor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 17. Distribusi skor hasil angket dari indikator menyukai/menolak**

<b>No. Responden</b>	<b>Skor</b>	<b>Kategori</b>
1.	28	Setuju/menyukai
2.	30	Setuju/menyukai
3.	30	Setuju/menyukai
4.	22	Tidak setuju/menolak
5.	21	Tidak setuju/menolak
6.	30	Setuju/menyukai
7.	30	Setuju/menyukai
8.	28	Setuju/menyukai
9.	30	Setuju/menyukai
10.	30	Setuju/menyukai
11.	30	Setuju/menyukai
12.	30	Setuju/menyukai
13.	30	Setuju/menyukai
14.	30	Setuju/menyukai
15.	30	Setuju/menyukai
16.	30	Setuju/menyukai
17.	23	Tidak setuju/menolak
18.	21	Tidak setuju/menolak
19.	21	Tidak setuju/menolak
20.	21	Tidak setuju/menolak
21.	30	Setuju/menyukai
22.	30	Setuju/menyukai
23.	21	Tidak setuju/menolak
24.	26	Ragu-ragu
25.	26	Ragu-ragu
26.	30	Setuju/menyukai
27.	30	Setuju/menyukai
28.	24	Ragu-ragu
29.	30	Setuju/menyukai
30.	27	Setuju/menyukai
31.	29	Setuju/menyukai
32.	24	Ragu-ragu
33.	26	Ragu-ragu
34.	30	Setuju/menyukai
35.	30	Setuju/menyukai
36.	29	Setuju/menyukai
37.	30	Setuju/menyukai

<b>38.</b>	24	Ragu-ragu
<b>39.</b>	30	Setuju/menyukai
<b>40.</b>	24	Ragu-ragu
<b>41.</b>	28	Setuju/menyukai

Sumber: Analisis data distribusi skor angket 2012

Berikut hasil distribusi frekuensi dari indikator harapan setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase Suharsimi Arikunto, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{26}{41} \times 100\%$$

$$= 63,41\%$$

$$= \frac{7}{41} \times 100\%$$

$$= 17,07\%$$

$$= \frac{7}{41} \times 100\%$$

$$= 17,07\%$$

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator harapan.

**Tabel 18. Distribusi frekuensi dari indikator menyukai/menolak**

No.	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju/menyukai	27 - 30	26	63,41%
2.	Ragu-ragu	24 - 26	7	17,07%
3.	Tidak setuju/menolak	21 - 23	7	17,07%
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>	<b>100%</b>

Sumber: Analisis data distribusi frekuensi 2012

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:

Sebanyak 26 responden atau 63,41% bahwa sikap masyarakat terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 yaitu menerima dan merespon positif program yang diberikan oleh Kemenpera, hal ini terlihat dari jawaban responden yang setuju terhadap pelaksanaan BSPS dan implementasinya dalam bentuk sikap.

Sebanyak 7 orang atau 17,07% ragu-ragu dalam menyikapi pelaksanaan program BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Ini dikarenakan masyarakat ragu akan tujuan yang akan dicapai oleh BSPS apakah dapat tercapai atau tidak dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari BSPS.

Responden yang bersikap menolak terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro sebanyak 7 orang responden atau 17,07%. Hal ini disebabkan karena masyarakat khawatir akan adanya praktek KKN oleh panitia maupun pihak yang terkait.

#### **D. Pembahasan**

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk dapat menjelaskan keadaan dan kondisi yang sebenarnya terkait “Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012”. Hasil analisis sebagai berikut:

### **1. Berdasarkan Indikator Pemahaman**

Hasil analisis data dari indikator pemahaman, sebanyak 15 responden (36,58%) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori baik/paham, hal ini terlihat dari jawaban responden yang baik terhadap BSPS dalam bentuk pemahaman. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah mengerti tentang tujuan, lingkup serta sasaran BSPS.

Sedangkan sebanyak 17 responden atau 41,46% menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan di Desa Madukoro masuk dalam kategori kurang baik/kurang paham. Ini dikarenakan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tujuan, lingkup dan sasaran pemberian BSPS, dan hal ini juga dapat disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia dalam mensosialisasikan program BSPS. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang memahami mengenai teori program BSPS.

Kemudian sebanyak 9 orang atau sekitar 21,95% menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masuk dalam kategori tidak paham. Karena mereka tidak dilibatkan langsung dalam sosialisasi atau mereka pada saat itu langsung mendapatkan bantuan tanpa diikutsertakan dalam acara sosialisasi. Hal ini mengakibatkan

ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan, lingkup, dan sasaran program BSPS.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap BPS, pada indikator pemahaman yang paling dominan terdapat dalam kategori kurang paham yaitu sebanyak 17 responden atau 41,46%. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang kurang memahami materi sosialisasi mengenai tujuan, lingkup, sasaran, serta bagaimana prosedur pelaksanaan yang telah diberikan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

## **2. Berdasarkan Indikatot Pendapat/tanggapan**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data dari indikator pendapat/tanggapan sebanyak 36 responden atau 87,80% menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dari indikator pendapat/tanggapan masuk dalam kategori baik, hal ini terlihat dari jawaban responden yang baik terkait konsep dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai suatu bentuk pendapat.

Sebanyak 4 responden atau 9,75% terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan

Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 masuk dalam kategori kurang baik. Ini dikarenakan kurang adilnya panitia dalam proses pendataan masyarakat yang berhak menerima dana BSPS. Hal ini mengakibatkan persepsi masyarakat kurang baik terhadap pelaksanaan program BSPS dalam bentuk tanggapan/pendapat.

Responden yang berpendapat mengenai pelaksanaan program BSPS di Desa Madukoro dalam kategori tidak baik sebanyak 1 orang responden atau 2,43 %. Hal ini dikarenakan bahwa tidak adilnya panitia dalam mendata masyarakat yang menjadi sasaran, atau dengan kata lain panitia melakukan praktek Kolusi dalam mendata masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam praktek di lapangan berdasarkan wawancara oleh salah seorang responden bahwa panitia lebih mendahului keluarga mereka untuk mendapatkan bantuan daripada masyarakat yang lebih berhak menerima. Selanjutnya ditemui di lapangan bahwa tidak meratanya masyarakat yang menjadi sasaran. Jadi dampak dari hal tersebut anggapan masyarakat yang tidak baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap program BSPS, pada indikator pendapat/tanggapan yang paling dominan terdapat dalam kategori baik yaitu sebanyak 36 responden atau 87,80%. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat beranggapan bahwa program BSPS merupakan program pemerintah yang banyak sedikitnya telah membantu Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat yang mendapat bantuan dalam penyediaan rumah yang sehat dan layak huni.

### **3. Berdasarkan Indikator Harapan**

Berdasarkan hasil analisis data dari indikator harapan sebanyak 38 responden atau 92,68% berpendapat bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 dari indikator harapan masuk dalam kategori lebih baik, hal ini terlihat dari jawaban responden yang baik terkait konsep dari pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai suatu bentuk harapan.

Sedangkan sebanyak 2 responden atau 4,87% dan 1 orang responden atau 2,43% adalah biasa saja dan kurang berharap terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara untuk periode selanjutnya. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa proses pendataan yang dilakukan oleh panitia kurang adil dan tidak semua dusun dijadikan sasaran bantuan. Hal ini dapat mengakibatkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap panitia pelaksana bahwa tujuan dari BSPS pada prakteknya tidak sesuai karena sarat dengan praktek Kolusi. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, panitia penyelenggara dengan aparat desa dalam proses pendataan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, karena bahwasanya aparat desa yang



lebih tahu lebih dalam terhadap situasi, kondisi, serta keadaan masyarakatnya khususnya masyarakat Desa Madukoro.

Jadi berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap program BSPS, pada indikator harapan yang paling dominan terdapat dalam kategori lebih baik yaitu sebanyak 38 responden atau 92,68%. Responden memiliki harapan yang baik dengan adanya BPS ini, masyarakat berharap agar program BPS ini dapat dilanjutkan untuk periode selanjutnya serta masyarakat berharap agar program BPS dapat adil dan merata serta syarat untuk mendapatkan bantuan lebih dipermudah.

#### **4. Berdasarkan Sikap Masyarakat dengan Indikator Menyukai/menolak**

Berdasarkan hasil analisis data sikap masyarakat dari indikator menyukai/menolak sebanyak 26 responden atau 63,41% berpendapat bahwa sikap masyarakat terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2011 dari indikator menyukai/menolak memiliki sikap masyarakat yang setuju/menyukai, hal ini terlihat dari jawaban responden yang setuju terhadap pelaksanaan BPS dan implementasinya dalam bentuk sikap.

Sebanyak 7 orang atau 17,07% terhadap pelaksanaan program BPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori ragu-ragu. Ini dikarenakan masyarakat ragu akan

tujuan yang akan dicapai oleh BSPS apakah dapat tercapai atau tidak dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari BSPS.

Responden yang berpendapat mengenai pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro masuk dalam kategori tidak setuju/menolak sebanyak 7 orang responden atau 17,07%. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tidak setuju/menolak adalah sebagai bentuk sikap masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk meminimalisir masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep mengenai tujuan dari program BSPS, program ini merupakan program bantuan social Kemenpera sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pada intinya sebagai sarana memberantas kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sikap masyarakat terhadap program BSPS, pada indikator menyukai/menolak yang paling dominan terdapat dalam kategori setuju/menyukai yaitu sebanyak 26 responden atau 63,41%. Sikap positif (setuju/menyukai) ditampilkan oleh masyarakat terhadap program BSPS.

Melihat fakta yang terdapat di lapangan, apabila dikaitkan dengan teori mengenai BSPS yang terdapat pada Bab II sungguh jauh berbeda.

Misalnya mengenai mekanisme pelaksanaan yaitu kriteria MBR penerima bantuan yang tidak sesuai dengan praktek di lapangan yaitu kriteria nomor 2 (hal 31). Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat dan persepsi yang negatif dari masyarakat terhadap program BSPS yang semulanya adalah baik, menjadi terbalik.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data instrument penelitian berupa angket, dapat disimpulkan bahwa:

Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 berdasarkan indikator pemahaman, sebanyak 17 responden (41,46%) dari 41 responden menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap BSPS di Desa Madukoro dalam bentuk pemahaman yaitu kurang paham. Sedangkan berdasarkan indikator pendapat/tanggapan, sebanyak 36 responden (87,80%) dari 41 responden menyatakan bahwa BSPS sudah baik. Selanjutnya sebanyak 38 responden (92,68%) berdasarkan indikator harapan berpendapat bahwa harapan BSPS untuk periode selanjutnya harus lebih baik.

Sebanyak 38 responden (92,68%) dari 41 responden menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara berdasarkan indikator menyukai/menolak yaitu setuju/menyukai terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dari keempat indicator dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi dan sikap masyarakat terhadap BSPS di Desa Madukoro yaitu BPS sebagai salah satu program pemerintah (Kemenpera) dianggap sebagai program yang baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yaitu program BPS belum dapat memenuhi harapan para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai terlalu berat. Oleh karena itu masyarakat berharap agar program BPS ini dilanjutkan untuk periode selanjutnya dengan berlandaskan keadilan serta merata agar tujuan program BPS dalam pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah pusat maupun daerah serta panitia penyelenggara diharapkan adanya kerjasama dengan aparatur desa untuk lebih memudahkan panitia dalam proses pendataan berdasarkan asas keadilan serta mempermudah dalam sosialisasi yang lebih baik lagi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) yang merupakan program bantuan social dari Kemenpera sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga tujuan akhir dari program ini dapat terwujud dan tepat sasaran.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat merubah pandangannya bahwa masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat disuatu daerah menjadi

tanggung jawab bersama baik tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1992. *Sosiologi: Sistematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Mohammad. 1984. *Penelitian Prosedur Pendidikan dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Anwar, Saifudin. 2000. *Sikap Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1992. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa. 2012. Pemkan Lampura: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Hadi, Sutrisno. 1996. *Metode Research*. Yayasan Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Haryanto, Dany. S.S. 2011. *Pengantar Psikologi Dasar*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Irwanto. 1996. *Psikologi Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juniarti, Mari. 1988. *Psikologi Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kartawijaya, Eddy Soewandi. 1996. *Mengukur Sikap Sosial (Pegangan Untuk Peneliti dan Praktisi)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Perumahan Rakyat. 2011. *Buku I: Petunjuk Pelaksanaan*. Jakarta: SATKER Penyediaan Perumahan.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

-----, dkk. 1996. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Mallo, Manase. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali.

Permenpera No. 14 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1-2.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1983. *Pengantar Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Usaha Nasional.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1984. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.

-----, 1999. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahono, Tri. dkk. 2007. *Manusia dan Ekonomi*. Jakarta: PT Phibeta Aneka Gama.

Walgito, Bimo. 1983. *Pengantar Psikologi Umum*. Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.

-----, 1993. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

-----, 2003. *Pengantar Sikap*. Bandung: Bina Cipta.

Zarkasi, Muslichah. 1992. *Psikologi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.